

TINGKAT RESPONSIVITAS MEMODERASI: PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN

Oleh :

Nirfa Ayunisa¹

Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
nirva.ayunisa@gmail.com

Didik Susetyo²

Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
didikusetyo@yahoo.com

Yusnaini³

Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
yusnaini@fe.unsri.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 07 Nov 2023

Direview : 12 Nov 2023

Disetujui : 30 Nov 2023

Co Author *nirva.ayunisa@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of local government characteristics and audit findings on financial performance moderated by the level of local government responsiveness. The population and sample are 180 districts and cities. secondary data from inspection reports. Financial reports audited by BPKRI from 2017 to 2019. Panel data regression analysis technique, evIEWS data processing software with a random effect model. The results show that legislative measures, SPI weaknesses and non-compliance with statutory regulations have no effect on financial performance. Meanwhile, government size and level of wealth have a significant effect on financial performance. The level of responsiveness cannot strengthen the influence of legislative measures, SPI weaknesses and non-compliance with statutory regulations on financial performance. Meanwhile, the level of responsiveness can strengthen the influence of government size and the level of regional government wealth on financial performance.

Keywords: Performance, Audit, Regional Government, Responsiveness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan hasil pemeriksaan terhadap kinerja keuangan dimoderasi tingkat responsivitas pemerintah daerah. Populasi dan sampel sebanyak 180 kabupaten dan kota. data sekunder dari Laporan hasil pemeriksaan Laporan keuangan yang diaudit oleh BPKRI tahun 2017 sampai dengan 2019. Teknik analisis regresi panel data software pengolahan data *evIEWS* dengan model *random effect*. Hasil menunjukkan ukuran legislatif, kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ukuran pemerintah, dan tingkat kekayaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Tingkat responsivitas tidak dapat memperkuat pengaruh ukuran legislatif, kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kinerja keuangan, sementara itu tingkat responsivitas dapat memperkuat pengaruh ukuran pemerintah dan tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: Kinerja, Pemeriksaan, Pemerintah Daerah, Responsivitas

PENDAHULUAN

Tujuan mendasar *new public management* adalah untuk meningkatkan pemberian pelayanan publik terutama di negara berkembang (Wardhani, Rossieta dan Martani, 2017): (Yusup dan Guohua, 2017). Tiga prinsip *Good Governance* yang sangat berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan transparansi, akuntabilitas (bertanggung jawab) dan respon. Transparansi artinya pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituntut untuk mengarah kepada kepentingan publik (Mardiasmo, 2022). Transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah adalah satu contoh dari beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah harus cepat merespon temuan dan rekomendasi dari hasil temuan BPK RI.

Kinerja keuangan adalah kinerja yang dinilai berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang. Kinerja non keuangan dinilai tidak berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang (Nugraheni, 2020). Pemerintah daerah sebagai pihak agen dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai pihak principal maka pemda harus meningkatkan kinerja keuangannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah pernyataan tentang besaran penerimaan dan pengeluaran yang diprediksi dan akan terjadi pada satu atau beberapa periode waktu mendatang (Bastian I, 2019). Rinaldi M. (2018), menyatakan bahwa APBD yang memiliki kecenderungan meningkat berarti desentralisasi anggaran pemerintah daerah dalam melakukan otonomi daerah berhasil

Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, ukuran legislatif, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, *leverage* daerah, dan *intergovernmental revenue* (Suhardjanto *et al.*, 2010), ukuran legislatif, tingkat kekayaan, (Setyaningrum dan Syafitri, 2012), ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan dengan pusat, *leverage* dan jumlah belanja yang digunakan (Andani *et al.*, 2019), Jumlah SKPD, ukuran daerah, pendapatan asli daerah, (Prayitno, S, 2012).

Tingkat Responsivitas terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, merupakan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi dari hasil audit yang bertujuan untuk mengeliminasi kelemahan yang ditentukan dan

memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. (Rambe, 2016), menjelaskan bahwa pada prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang dikatakan baik dapat dipengaruhi oleh adanya tindak lanjut rekomendasi dari audit BPK, SPI dan implementasi standar akuntansi pada pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk dapat meningkatkan implementasi tata kelola pemerintah yang baik, responsivitas penyelesaian tindak lanjut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pejabat yang berwenang. Dampak positif dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit/pemeriksaan dibuktikan dalam penelitian Munawar (2016), dimana tindak lanjut rekomendasi dapat meningkatkan kemungkinan pemerintah daerah untuk mendapatkan opini audit yang lebih baik.

Penelitian ini masih menimbulkan hasil yang belum konsisten, misalnya: ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Perwitasari, 2018; Setyaningrum, 2012), sementara itu ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Noviyanti, 2014; Setyaningrum, 2012), selanjutnya ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Andani *et al.*, 2019; Siddi, 2016), sementara ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Noviyanti, 2014), Selanjutnya tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Setyaningrum, 2012 dan Nugraheni, 2020), sementara tingkat kekayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Noviyanti, 2014).

Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Munawar, 2016, Furqan *et al.*, 2020), kelemahan SPI tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Munawar, 2016), Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Kirana, 2019),

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK dalam penelitian ini disebut tingkat responsivitas menjadi variabel moderasi, dengan alasan sebagai berikut: a). respon kepala daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi, akan segera mengurangi masalah,

sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah, 2). Pemerintah daerah yang komitmen dengan *Good Governance*, akan cepat merespon apabila ada terdapat temuan dalam pemeriksaan, 3). Beberapa penelitian menghasilkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan signifikan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, (Furqan *et al*, 2020)

Bertitik tolak dari latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah faktor-faktor karakteristik pemerintah daerah (ukuran legislatif, ukuran pemerintah daerah dan tingkat kekayaan daerah) dan hasil temuan pemeriksaan (kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan) mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah? dan bagaimanakah peran tingkat responsivitas pemerintah daerah dalam memoderasi pengaruh faktor karakteristik pemerintah daerah (ukuran legislatif, ukuran pemerintah daerah dan tingkat kekayaan daerah) dan hasil temuan pemeriksaan (kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?. Penelitian ini memasukkan tingkat responsivitas sebagai variabel moderasi yang selama ini hanya dijadikan oleh peneliti sebagai variabel yang mempengaruhi (bebas), sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *good governance*

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Nugraheni (2020), menerangkan salah satu alat untuk melakukan analisis kinerja keuangan Pemda, yaitu dengan menerapkan analisis rasio terhadap APBD yang sudah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis rasio keuangan pada APBD dapat diterapkan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui sebagaimana kecenderungan yang terjadi. Salah satu alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal digambarkan dalam rasio kemandirian keuangan daerah (Susilawati, 2018). rasio kemandirian suatu daerah yang tinggi, menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal (pusat dan provinsi) dikatakan semakin rendah, sebaliknya

rasio kemandirian yang rendah, maka tingkat ketergantungan semakin tinggi (Bastian I, 2019)

Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik Pemerintah Daerah, merupakan ciri-ciri khusus yang menandai sebuah daerah dan memiliki perbedaan dengan daerah lainnya (Kusumawardhani, 2012). Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Ukuran legislatif.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Pasal 155, menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan
- b. Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat berkontributif untuk kegiatan operasional pemerintahan daerah yang diikuti dengan peningkatan *performance* keuangan pemerintah daerah (Kusumawardani, 2012). Indikator variabel ukuran pemerintah yang digunakan Kusumawardani (2012), menggunakan total aset pemda, sedangkan Muid, (2014), menggunakan Ln total pendapatan, Ukuran pemerintah daerah menggunakan total aset lebih baik karena nilai aset relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur ukuran perusahaan (Marhawai, 2015)
- c. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah
Kinerja pemerintah daerah yang memiliki nilai tambah terhadap Pendapatan Asli Daerahnya dinilai mampu meningkatkan kemandirian potensi daerahnya sendiri. Hal ini memperkuat peran pemerintah daerah sebagai agen yang mendapat kewenangan dari pemerintah pusat yang dapat dipercaya dalam mengelola daerahnya sendiri sumber daya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kekayaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, pada akhirnya akan meningkatkan skor kinerja yang diterima dari pemerintah pusat (Handi dan Jatmiko, 2015). Dalam perspektif teori keagenan, keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan Peran sebagai agen dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan

kewenangannya untuk mengelola sumber dayanya sendiri, yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari jumlah Sumber Daya Daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

Temuan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksa harus mengungkapkan temuan dalam LHP apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. Temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan

(1). Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelemahan SPI meliputi: a). kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP), b). kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPAPB), dan c). kelemahan struktur pengendalian intern (KStPI). (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008), (Rambe, 2016)

(2). Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK 2017) Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Tingkat Responsivitas

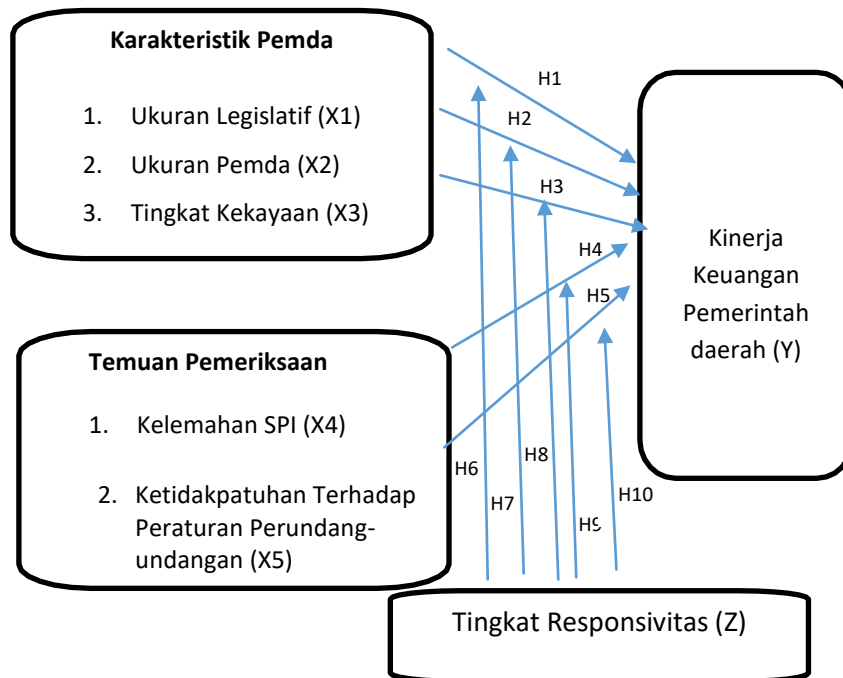
Salah satu bentuk responsivitas dari pemerintah daerah yaitu dalam menyelesaikan rekomendasi yang dilimpahkan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan. Banyaknya jumlah tindak lanjut dari rekomendasi diharapkan dapat mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan, sehingga berdampak pada perbaikan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan serta *good governance* pada pemerintahan daerah dapat semakin ditingkatkan. (Sari, 2013) (Furqon, *et al*, 2020).

Mengacu pada literatur tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

1. Ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Marhawai, 2015) (Gusnaini, *et al*, 2020), (Aswar, K, 2019)
2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Andani, *et al.*, 2019), (Gusnaini, *et al*, 2020)
3. Ukuran kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Amyulianthy, *et al.*, 2016), (Nugraheni dan Priyo (2020)
4. Kelemahan SPI berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Munawar, *et al.*, 2016), (Kirana, *et al.*, 2019)
5. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (BPK, 2017) (Furqon *et al*, 2020)
6. Tingkat responsivitas memoderasi pengaruh ukuran legislative terhadap kinerja keuangan ((Peraturan BPK RI No. 1 tahun 2017), (Undang-undang No 32 tahun 2014), (Kirana, 2019)
7. Tingkat responsivitas memoderasi pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan (Kirana, 2019), (Furqan *et al.*, 2020)
8. Tingkat responsivitas memoderasi pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan (Kirana, 2019)
9. Tingkat responsivitas memoderasi pengaruh kelemahan SPI terhadap kinerja keuangan (Furqon *et al*, 2020), (Munawar, *et al.*, 2016)
10. Tingkat responsivitas memoderasi pengaruh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kinerja keuangan (Furqon *et al*, 2020), (Munawar, *et al.*, 2016)

Variabel Independen

Variabel Dependen



Sumber: Penulis (2023)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif dan bersifat asosiatif. Dimensi waktu yang diperlukan pada penelitian ini merupakan *time series* atau data panel, yaitu laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemda (Pemerintah Daerah) di Indonesia yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dengan cara pengumpulan data dari: 1). laporan realisasi anggaran (LRA) berupa total pendapatan asli daerah, total asset, 2). Data dari Badan pusat statistik untuk jumlah anggota legislatif, 3). data tindak lanjut temuan dan rekomendasi dari BPK RI. Metode penarikan sampel yang dipakai pada penelitian ini ialah sampel jenuh. Hal ini disebabkan semua kabupaten dan kota memiliki data yang lengkap, yaitu sebanyak 60 Kabupaten dan Kota dengan data masing-masing 3 tahun, jadi jumlah observasi 180. Teknik analisis, dilakukan dengan statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis (pengujian signifikansi persamaan 1 dan 2), koefisien determinasi. Model penelitian, pengolahan data dengan program *eviews*,

pemilihan estimasi data panel menggunakan *coomon effect* dan *random effect*,

Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Kinerja keuangan pemerintah daerah (Y), diukur menggunakan rasio kemandirian dengan cara membagi pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman, sedangkan karakteristik pemerintah daerah (X) dengan menggunakan proksi a). ukuran legislative diukur dengan jumlah anggota legislatif, b). Ukuran Pemerintah Daerah, diukur dengan total asset pemerintah daerah (log n), c). Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, diukur dengan jumlah pendapatan asli daerah (log n), selanjutnya temuan hasil pemeriksaan, menggunakan proksi d). Kelemahan SPI, diukur dengan jumlah kelemahan SPI, e). Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan, diukur dengan jumlah ketidakpatuhan, f). Tingkat responsivitas pemerintah daerah (Z), diukur dengan membagi jumlah tindak lanjut yang diselesaikan sesuai dengan rekomendasi dengan jumlah total rekomendasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk menentukan model yang akan dipilih antara *Common effect* atau *Random effect* dalam

pengolahan data panel. Berdasarkan uji pemilihan model maka model yang digunakan adalah *Random effect* (nilai probabilitas pada *Both* kurang dari 0,05

(0,000 < 0,05)). Dibawah ini analisis deskriptif statistic menunjukkan:

Tabel 1. Analisis Deskriptif Statistik

Keterangan	KKPD_Y	UL_X1	UPD_X2	TKPD_X3	KSPI_X4	KTPP_X5	TRPD_Z
Mean	12.55257	34.75000	12.34899	10.96405	20.23889	12.26111	44.74685
Median	9.362195	35.00000	12.31783	10.93567	18.50000	12.00000	41.54040
Maximum	57.21079	50.00000	13.21161	12.03811	55.00000	32.00000	100.0000
Minimum	3.534901	25.00000	12.05412	10.29848	8.000000	3.000000	3.225806
Std. Dev.	9.305015	8.411136	0.199042	0.322329	7.914603	3.700164	20.94333
Skewness	2.423072	0.311858	1.525678	0.592228	1.219456	1.262216	0.255284
Kurtosis	9.684544	1.826989	6.791900	4.045027	5.260660	7.200348	2.402398
Jarque-Bera	511.2618	13.23733	177.6696	18.71263	82.94160	180.1176	4.633566
Probability	0.000000	0.001335	0.000000	0.000086	0.000000	0.000000	0.098590
Sum	2259.463	6255.000	2222.818	1973.529	3643.000	2207.000	8054.432
Sum Sq. Dev.	15498.41	12663.75	7.091594	18.59740	11212.73	2450.728	78513.56
Observations	180	180	180	180	180	180	180

Sumber: Data Diolah, 2022

Mengacu pada tabel 1, menunjukkan bahwa nilai mean > nilai standar deviasi, sehingga data berkualitas baik. Selanjutnya persamaan

analisis regresi dengan random effect adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Regresi random effect) persamaan 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-146.4512	41.36419	-3.540532	0.0005
UL_X1	-0.136706	0.102567	-1.332839	0.1843
UPD_X2	-7.847470	3.668539	-2.139127	0.0338
TKPD_X3	23.69041	1.937488	12.22738	0.0000
KSPI_X4	0.055204	0.024157	2.285235	0.0235
KTPP_X5	-0.016105	0.060085	-0.268041	0.7890
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			5.256627	0.8594
Idiosyncratic random			2.125929	0.1406
Weighted Statistics				
R-squared	0.476522	Mean dependent var	2.854212	
Adjusted R-squared	0.461480	S.D. dependent var	3.028060	
S.E. of regression	2.222109	Sum squared resid	859.1719	
F-statistic	31.67847	Durbin-Watson stat	1.821501	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.607791	Mean dependent var	12.55257	
Sum squared resid	6078.613	Durbin-Watson stat	0.739569	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Hasil uji asumsi klasik uji normalitas baik persamaan 1 data menunjukkan data residual tidak normal, tetapi karena jumlah observasi lebih 30 maka data dikatakan distribusi normal. Uji multikolonieritas menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas karena nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,100. Uji Heteroskedastisitas menunjukkan nilai probability Chi square sebesar 0,000 kurang dari 0,05 untuk persamaan 1 sehingga model regresi ada masalah Heteroskedastisitas (model random effect tidak memerlukan asumsi klasik). Selanjutnya uji autokorelasi menunjukkan Karena nilai DW berada pada 1,65 sampai 2,35 maka tidak ada masalah autokorelasi. Untuk menguji hipotesis (uji t), dilakukan dengan membandingkan probabilitas > 0,05 (tidak berpengaruh), bila probabilitas < 0,05 (berpengaruh).

- a. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. Hal ini karena nilai probabilitas > 0,05 (0,184 > 0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.
- b. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena nilai probabilitas < 0,05 (0,033 < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Pengaruhnya negatif karena nilai koefisien regresi negatif, artinya

jika ukuran pemerintah meningkat maka kinerja keuangan akan menurun.

- c. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini karena nilai probabilitas < 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Pengaruhnya positif karena nilai koefisien regresi positif, artinya jika tingkat kekayaan pemerintah meningkat maka kinerja keuangan juga akan meningkat.
- d. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini karena nilai probabilitas < 0,05 (0,023 < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Pengaruhnya positif karena nilai koefisien regresi positif, artinya jika kelemahan sistem pengendalian intern meningkat maka kinerja keuangan juga akan meningkat.
- e. Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini karena nilai probabilitas > 0,05 (0,789 > 0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

Berikut ini persamaan 2 analisis regresi dengan random effect, persamaan ini menunjukkan moderasi variabel Z atas pengaruh variabel X dan Y

Tabel 3 Analisis Regresi random effect) persamaan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-131.2224	40.60754	-3.231479	0.0015
UL_X1	-0.125651	0.118874	-1.057011	0.2920
UPD_X2	-15.88722	3.920363	-4.052488	0.0001
TKPD_X3	31.08077	2.672640	11.62924	0.0000
KSPI_X4	0.136134	0.055846	2.437653	0.0158
KTPP_X5	0.025415	0.102119	0.248876	0.8038
X1Z	-9.35E-06	0.001297	-0.007210	0.9943
X2Z	0.139560	0.035580	3.922403	0.0001
X3Z	-0.153464	0.040899	-3.752288	0.0002
X4Z	-0.001575	0.001244	-1.265863	0.2073
X5Z	6.78E-05	0.002253	0.030120	0.9760
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			5.192667	0.8725
Idiosyncratic random			1.984617	0.1275

Tabel 3 Analisis Regresi random effect) persamaan 2 (lanjutan)

Weighted Statistics			
R-squared	0.530899	Mean dependent var	2.704797
Adjusted R-squared	0.503141	S.D. dependent var	2.956149
S.E. of regression	2.083737	Sum squared resid	733.7910
F-statistic	19.12632	Durbin-Watson stat	1.833228
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.617261	Mean dependent var	12.55257
Sum squared resid	5931.845	Durbin-Watson stat	0.749594

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Hasil uji asumsi klasik uji normalitas baik persamaan 2 data menunjukkan data residual tidak normal, tetapi karena jumlah observasi lebih 30 maka data dikatakan distribusi normal. Uji multikolonieritas menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas karena nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,100. Uji Heteroskedastisitas menunjukkan nilai probability Chi square sebesar 0,000 kurang dari 0,05 untuk persamaan 2 sehingga model regresi ada masalah Heteroskedastisitas (model random effect tidak memerlukan asumsi klasik). Selanjutnya uji autokorelasi menunjukkan Karena nilai DW berada pada 1,65 sampai 2,35 maka tidak ada masalah autokorelasi. Untuk menguji hipotesis (uji t), dilakukan dengan membandingkan probabilitas > 0,05 (tidak berpengaruh), bila probabilitas < 0,05 (berpengaruh).

Berdasar uji t pada persamaan 2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tingkat Responsivitas tidak dapat memperkuat pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini karena pada variabel X1Z nilai probabilitas > 0,05 (0,994 > 0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.
- Tingkat Responsivitas dapat memperkuat pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini karena pada variabel X2Z nilai probabilitas < 0,05 (0,0001 < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.
- Tingkat Responsivitas dapat memperkuat pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini karena pada variabel X3Z nilai probabilitas < 0,05 (0,0002 < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.

- Tingkat Responsivitas tidak dapat memperkuat pengaruh Kelemahan SPI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini karena pada variabel X1Z nilai probabilitas > 0,05 (0,207 > 0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.
- Tingkat Responsivitas tidak dapat memperkuat pengaruh Ketidapatuhan pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini karena pada variabel X5Z nilai probabilitas > 0,05 (0,976 > 0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

Hasil uji F menunjukkan bahwa Ukuran Legislatif, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Kelemahan SPI, dan Ketidapatuhan pada Peraturan Perundang-undangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena nilai probabilitas pada uji F kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran legislative Terhadap Kinerja Keuangan

Mengacu pada hasil penelitian khususnya hipotesis pertama ditolak, artinya ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini berarti bahwa jumlah anggota legislatif yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan kinerja keuangan, khususnya rasio kemandirian keuangan daerah (jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman). Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPRD belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai pengawas

pelaksanaan APBD, sehingga belum bisa meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Gusnaeni, et al (2020), Sri (2021), Kamela & Setyaningrum (2020), Setyaningrum dan Syahfitri, (2020) dan Aswar (2019), selanjutnya penelitian ini sejalan dengan Marhawai (2015), dan Noviyanti (2016)

Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian terutama hipotesis kedua diterima, artinya ukuran Pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti semakin besar jumlah total asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan secara optimal akan mempengaruhi kinerja keuangan dalam hal ini kemandirian keuangan daerah, karena pemanfaatan asset yang besar dan optimal akan menghasilkan pendapatan asli daerah, selain itu juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.

Hasil penelitian sejalan dengan Andani dkk (2019), selanjutnya penelitian ini tidak sejalan dengan Gusnaeni (2020), Marhawai (2015), Nugraheni dan Priyo (2020), Muid (2014), disisi lain ukuran pemerintah dapat memoderasi pengaruh tingkat kekayaan dengan kinerja pemerintah daerah. Beberapa hasil penelitian mengindikasikan bahwa total asset yang besar bila tidak dimanfaatkan dengan optimal hanya akan menjadi beban dan tidak menghasilkan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis ketiga membuktikan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah (pendapatan asli daerah) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, ini berarti bahwa semakin besar jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan akan dipergunakan untuk membangun daerah sehingga fasilitas yang dibangun akan dipergunakan untuk memberikan layanan public dan akan menghasilkan kembali pendapatan asli daerah, selanjutnya kinerja keuangan akan meningkat. Sebaliknya pendapatan asli daerah yang rendah tidak dapat melakukan pembangunan yang ditujukan untuk pelayanan public dan tidak dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tolok ukur kemandirian keuangan suatu daerah, sehingga upaya

pemerintah daerah harus menggali potensi sumber daya yang bersumber dari daerah tersebut, hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Amyulianty (2016), setyaningrum dan syahfitri (2020), Nugraheni dan Priyo (2020), Muid (2014), sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Prasetyo (2016).

Pemerintah daerah perlu menggali dari berbagai sumber antara lain pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak galian golongan C, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan), selain itu perlu digali juga sumber retribusi daerah (retribusi perizinan, retribusi pelayanan dan retribusi usaha), memaksimalkan dari bagian laba BUMD juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan asset tetap pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan

Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis keempat ditolak. Ini berarti bahwa semakin banyak kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah, maka kinerja keuangan akan menurun sebaliknya jumlah kelemahan SPIP yang kecil akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan dengan adanya kelemahan SPIP yang besar, maka penyelewengan akan semakin besar sehingga APBD tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak sesuai dengan Munawar (2016) dan Furqan (2020), sebaliknya penelitian ini sejalan dengan penelitian Kirana dkk (2019).

Hasil penelitian lain tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), misalnya pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Soleman, 2013), semakin kuat pengendalian intern, maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan, sebaliknya semakin lemah

pengendalian intern pencegahan kecurangan semakin leluasa, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Disisi lain kualitas pengendalian intern berpengaruh signifikan dengan proses tindak lanjut temuan, kompetensi fungsi auditor intern, dan keterlibatan komite audit, efektivitas pengendalian intern secara tidak signifikan mempengaruhi hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah (Nurdiono *et al*, 2016), jumlah temuan audit atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan audit kepatuhan secara bersama berpengaruh negatif terhadap opini atas LKPD.

Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis kelima Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hasilnya ditolak. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian Probohudono (2015), menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah, semakin besar kelemahan temuan kasus dan nilai ketidakpatuhan yang ditemukan maka BPK akan memberikan opini tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. pengendalian intern dapat dicapai perusahaan melalui kepatuhan terhadap kerangka hukum yang memperkuat tatakelola pemerintah, sedangkan penelitian yang sejalan dilakukan oleh Kirana dkk (2019), dan Munawar (2016)

Tingkat Responsivitas Dapat Memperkuat Pengaruh Ukuran legislatif Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hipotesis keenam, yaitu tingkat responsivitas dapat memperkuat pengaruh jumlah legislative terhadap kinerja keuangan dan hasilnya tidak terbukti (tidak dapat memperkuat), hal ini berarti tugas dan fungsi anggota legislative

diantaranya melakukan pengawasan atas tindaklanjut temuan BPK atas hasil audit laporan keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat rata-rata respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan temuan atau rekomendasi BPK atas hasil audit rata-rata hanya sebesar 44,75%. Angka 44,75% juga menunjukkan bahwa respon pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan masih rendah, sehingga tidak dapat memperkuat tugas dan fungsi DPRD dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat Responsivitas Dapat Memperkuat Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hipotesis ketujuh, yaitu tingkat responsivitas dapat memperkuat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan dan hasilnya terbukti (dapat memperkuat), hal ini berarti pemerintahan yang memiliki total asset yang besar memiliki permasalahan yang kompleks dan diperlukan sumber daya manusia yang handal, maka cenderung merespon temuan atau rekomendasi hasil audit BPK ini dengan cepat, sehingga tidak permasalahan yang dihadapi tidak semakin bertambah dan pada akhirnya kinerja keuangan dapat meningkat. Selain itu komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan temuan atas rekomendasi hasil audit BPK juga sangat diperlukan, hal ini dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung memiliki tingkat responsivitas yang tinggi dalam menindaklanjuti temuan.

Disisi lain pemerintah yang memiliki total asset yang tinggi juga memiliki tingkat responsivitas yang tinggi, misalnya Kota Palembang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Musi Banyuasin dan lain-lainnya, semakin cepat merespon atas temuan tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat Responsivitas Dapat Memperkuat Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hipotesis kedelapan, yaitu tingkat responsivitas dapat memperkuat pengaruh tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan dan hasilnya terbukti (dapat memperkuat), hal ini berarti pemerintahan yang

memiliki total pendapatan asli daerah yang besar cenderung mempunyai permasalahan yang tinggi dan diperlukan sumber daya manusia yang cepat dapat menghadapi masalah ini, maka cenderung merespon temuan atau rekomendasi hasil audit BPK ini dengan cepat, sehingga tidak permasalahan yang dihadapi tidak semakin bertambah dan pada akhirnya kinerja keuangan dapat meningkat. Selain itu komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan temuan atas rekomendasi hasil audit BPK juga sangat diperlukan, hal ini dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung memiliki tingkat responsivitas yang tinggi dalam menindaklanjuti temuan.

Tingkat Responsivitas tidak dapat Memperkuat pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hipotesis kesembilan, yaitu tingkat responsivitas tidak dapat memperkuat pengaruh kelemahan SPIP terhadap kinerja keuangan dan hasilnya terbukti (tidak dapat memperkuat), hal ini berarti pemerintahan yang memiliki jumlah kelemahan sistem pengendalian intern yang banyak cenderung memiliki permasalahan yang tinggi dan tidak memiliki sumber daya manusia yang handal untuk menyelesaikan masalah ini, maka cenderung merespon temuan atau rekomendasi hasil audit BPK ini dengan lambat sehingga permasalahan yang dihadapi semakin bertambah dan pada akhirnya kinerja keuangan tidak dapat meningkat. Selain itu komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan temuan atas rekomendasi hasil audit BPK juga sangat rendah serta fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik.

Mengacu pada penjelasan tersebut, tingkat responsivitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan tidak dapat dapat memperkuat atau tidak dapat menurunkan jumlah kelemahan sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat meningkat.

Tingkat Responsivitas tidak dapat Memperkuat Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hipotesis kesepuluh, yaitu tingkat responsivitas dapat tidak dapat memperkuat pengaruh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kinerja keuangan dan hasilnya terbukti (tidak dapat memperkuat), hal

ini berarti pemerintahan yang memiliki jumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang besar cenderung memiliki permasalahan yang sangat banyak dan kurang memiliki sumber daya manusia yang handal untuk menyelesaikan masalah ini, maka cenderung merespon temuan atau rekomendasi hasil audit BPK ini dengan lambat sehingga permasalahan yang dihadapi semakin bertambah dan pada akhirnya kinerja keuangan tidak dapat meningkat. Selain itu komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan temuan atas rekomendasi hasil audit BPK juga sangat rendah serta fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: a). Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan, dan kelemahan SPI berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, b). Ukuran legislatif, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan., c). Tingkat responsivitas dapat memperkuat pengaruh ukuran pemerintah daerah dan tingkat kekayaan terhadap kinerja keuangan, selanjutnya, d). Tingkat responsivitas tidak dapat memperkuat pengaruh ukuran legislatif, kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap kinerja keuangan.

Rekomendasi

Selanjutnya rekomendasinya adalah:

- a) rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil audit Laporan Keuangan harus cepat ditindaklanjuti, agar dapat meningkatkan kinerja keuangan, dan
- b). penelitian selanjutnya juga perlu menggunakan proksi lain untuk mengukur variabel tingkat responsivitas, misalnya jumlah tindak lanjut dengan jumlah rekomendasi, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih baik. Keterbatasan Penelitian, jumlah sampel hanya 12%, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianty K, Khair J dan Lysandra S., 2016. *Characteristics and Political Connection To Local Government Performance*, JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET), Vol. 8 No 2, Hal. 1-14

- Andani M, Sarwani dan Respati., 2019. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Vol. 9 No. 2. Hal. 111-130
- Aswar K., 2019. *Financial Performance of Local Governments in Indonesia*, European Journal of Business and Management Research, Vol. 4, No. 6, p: 1-6
- Bastian, Indra.,2019.. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga
- Fikri RU, Einde E, Rindu RG., 2019. *The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration*,. International Business Journal Business Studies,. ISSN: 2089-6271 | e-ISSN: 2338-4565
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D., 2020. *The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia*. International Journal of Public Sector Management, 33(5), 535–559.
- Gusnaini, Andesto Dan Ermawati.,2020. *The Effect Of Regional Government Size, Legislative Size, Number Of Population, And Intergovernmental Revenue On The Financial Statements Disclosure*, European Journal of Business and Management Research, Vol. 5, No. 6, p: 1-4
- Handi Y. L Dan Bambang Jatmiko.,2015. *Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunung kidul)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 5, No 1
- Kamela and Setyaningrum.,2020. *Do Political Factors Affect Financial Performance in Public Sector ?*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 5 No. 2, Hal. 203-209
- Kirana T, dkk.,2019. *Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidapatuhan Pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan*, Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan , ISSN: 2086-7662 , Vol. 12 No. 2, Hal. 186-207.
- Kusumawardani, M.,2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal Vol 1 No 1., Hal. :27-35.
- Mardiasmo.,2022. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Diakses Tanggal 28 April 2022. [Http://Ejournal.Narotama.Ac.Id/Files/Jurnal/onomidaerahmardiasmo.Pdf](http://Ejournal.Narotama.Ac.Id/Files/Jurnal/onomidaerahmardiasmo.Pdf)
- Mardiasmo., 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Marhawai., 2015. *Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 s.d 2014)*, Jurnal Telaag Riset Akuntansi, Universitas Syiah Kuala Aceh, Vol. 08 No. 01 Hal. 49-58.
- Muid, D. 2014. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol 10 No 6, pp. 513–527.
- Munawar, M., Nadirsya, N. and Abdullah, S.,2016. *Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan Terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh*, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 5(2), pp. 57–67.
- Nofianti, L. and Suseno, N. S., 2014. *Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications towards Performance Accountability*, in *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Elsevier B.V., pp. 98–105.
- Nugraheni E Dan Priyo.,2020. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis*, Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , ISSN : 2442 - 9708 (Online)

- Nurdiono *et al.*, 2016. *The Effect Of Budgets ' Proportion And Non-Financial Factors On The Audit Results Of Local Governments ' Faculty of Economics and Business , Universitas Lampung , Indonesia Faculty of Economics and Business , Universitas Gadjah Mada (ssugiri@feb.ugm.ac.i'*, *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(2), pp. 178–191.
- Perwita Sari, R. *et al.*. 2018. *Analysis Of Financial Performance In Public Sector (A Case Study in Lamongan, East Java-Indonesia)*, *JASF Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(1), pp. 82–90.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2017, Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Prasetyo, A., & Putrini, C., 2016. *Head of Regional Characteristics and the Local Government Performance in Indonesia*. Volume 4 No 3 , hal. 44–55.
- Prayitno, Setyo., 2012. *Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis. Surakarta: UNS.
- Probahudono, R. S. A. & A. N., 2015. *Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara*, *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi*, Vol 1 (November), hal. 81–110.
- Rambe, Evayanti Br., 2016. *Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Peran Pengawasan Sebagai Pemoderasi*. Depok : Disertasi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Rinaldi, M., 2018. *Pengaruh Belanja Pegawai, Mandatory Spending, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Fiscal Space Seluruh Provinsi Di Sumatera*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 7 No. 1 , Hal. 50–74.
- Sari, D., 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah & Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. *Indonesian Journal Of Economics And Business IJEB*, Vol. September , Hal. 43-50.
- Setyaningrum, D. Dan Syafitri, F., 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol 9 No. 2, Hal. 154-170.
- Sidi, P., 2016. *Peran Karakteristik Keuangan dan Opini Audit Dalam Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, *Jamal*, Vol 7 No 3, Hal 425–442.
- Suhardjanto, dkk., 2010. *Influence of Parliament Characteristics toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia*. Hibah Penelitian
- Soleman, R., 2013. *Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pen cegahan fraud*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol 17 No 1, hal 57–74.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23. Tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- Wardhani, R., Rossieta, H. and Martani, D., 2017. *Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia*, *International Journal of Public Sector Performance Management*, Vol 3 No 1, p. 77.
- Yusuph & Guohua, W., 2017. *Challenges for Implementing New Public Management Reforms in Local Government in Tanzania: Evidence from Six Selected Local Government Authorities*, *Public Policy and Administration Research*, Vol 7 No 6, pp. 32–45.